

# KONVENSI CALON PRESIDEN PARTAI DEMOKRAT

Aryojati Ardipandanto<sup>\*)</sup>



## Abstrak

*Konvensi merupakan salah satu cara menjaring calon presiden diyakini sebagai metode yang lebih demokratis. Salah satunya adalah Konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Konvensi ini selain memiliki kelebihan, antara lain untuk menghapuskan sistem oligarki partai, juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain ketidak-laziman dalam mengundang kader atau kandidat dari luar Partai Demokrat. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak optimal dalam melakukan kaderisasi dalam tubuh partainya sendiri, sehingga perlu orang-orang dari luar partai untuk menjadi Calon Presiden 2014.*

## A. Pendahuluan

Konvensi belakangan ini ramai digunakan partai politik (parpol) untuk mencari pemimpin hingga calon presiden (capres) tahun 2014. Salah satunya adalah yang dilakukan Partai Demokrat. Partai Demokrat berencana mengundang sejumlah tokoh di luar partainya untuk ikut dalam konvensi. Salah satunya, kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) Endriartono Sutarto. Alhasil, mantan Panglima TNI ini harus kehilangan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan NasDem.

Sebagai hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di Bali 31 Maret 2013 yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah menjabat Sebagai Ketua umum SBY memang terlihat terus berekspresi untuk “mendongkrak” suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 mendatang, yang salah satunya adalah mengadakan Konvensi Capres. SBY sengaja membuka konvensi capres, untuk memancing tokoh-tokoh kuat di luar parpol agar bergabung bersama Partai Demokrat. Walaupun hasil konvensi bisa saja setengah hati, hanya untuk memasukkan tokoh di luar parpol ke Partai Demokrat, ide ini betul-betul dapat mengubah sistem pengambilan keputusan di tubuh Demokrat yang selama ini dinilai sentralistis menjadi betul-betul demokratis.

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com



## B. Pengajuan Calon Presiden di Indonesia

Konvensi Capres atau *primary election* adalah sebuah cara yang dilakukan partai politik seperti di Amerika Serikat untuk menyeleksi secara internal para kandidat presiden sebelum partai itu resmi mengusulkan capres kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dipilih publik dalam pemilu.

Di Indonesia, UUD 1945 menegaskan, untuk menjadi Presiden di negeri ini hanya ada satu cara untuk “merebutnya”, yakni Calon Presiden tersebut harus diusung oleh Partai Politik. Dalam Pemilihan Presiden tidak dikenal konsep Calon Perseorangan atau Calon Independen, walaupun dalam Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur atau Bupati/Walikota, ruang untuk Calon Independen telah dibuka lebar-lebar. Walau sudah banyak pihak yang mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi agar Calon Perseorangan mendapatkan “jatah” untuk diikuti dalam Pemilihan Presiden, tapi hingga kini belum ada satu pun regulasi yang memperkenankan Calon Independen berhak untuk tampil menjadi salah satu kandidatnya. Hal ini dapat dipahami, karena selama UUD 1945 yang berhubungan dengan Pasal atau Ayat Pemilihan Presiden tidak diamandemen, maka selama itu pula “tiket” untuk menjadi Presiden hanya dikantongi oleh Partai Politik.

## C. Konvensi Capres Partai Demokrat

Konvensi Capres yang akan dilakukan Partai Demokrat atau Ide *primary election* yang diusung Partai Demokrat untuk menjaring calon presiden dan wakil presiden (capres) pada Pemilu 2014 dinilai ideal dalam sistem demokrasi, akan tetapi mari kita lihat kekurangan dan kelebihan dalam sistem *primary election*.

Ide ini betul-betul dapat mengubah sistem pengambilan keputusan di tubuh Demokrat yang sentralistis menjadi demokratis. Di sisi lain akan timbul opini Partai Demokrat mampu mengambil keputusan dengan demokratis, serta akan berpengaruh secara elektoral terhadap calon Partai Demokrat di provinsi dan kabupaten/kota.

Kelemahan sistem ini, menurut

Pengamat Politik Universitas Gajah Mada, Ari G. Dwipayana – adalah bisa menguras energi yang besar dari kandidat, sehingga pada saat bersamaan, kandidat sudah kehilangan energi untuk bersaing di pemilihan presiden yang sesungguhnya. Sistem konvensi ini bisa memunculkan pasar politik baru akan memunculkan politik transaksional dalam partai. Konstituen bisa menjual dukungannya melalui proses konvensi. Jadi, Ada *money politics* lebih awal.

Namun, Konvensi ini bisa membawa nilai positif. Proses nominasi presiden melalui konvensi dinilai lebih demokratis. Bukan hanya pengurus, tapi pejabat partai juga bisa mencalonkan. Itu memungkinkan kompetisi melibatkan anggota partai. Konvensi juga memungkinkan figur yang akan mencalonkan diri jadi presiden berkompetisi secara terbuka di internal partai. Jadi tidak menutup (seperti sebelumnya) ketua umum harus jadi presiden.

Menurut Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi *Syndicate*, Ari Nurcahyo, kelebihan cara ini adalah bisa mencegah politik dinasti dari parpol. Tak hanya itu, Konvensi juga bisa mengembalikan citra partai di mata masyarakat dengan munculnya tokoh-tokoh baru. Konvensi dapat memberi kesempatan kandidat potensial, baik dari dalam maupun dari luar partai, sekaligus untuk mengurangi kuatnya politik oligarki dan dinasti di dalam partai. Dengan konvensi, membuka peluang bagi partai politik untuk memulihkan citranya.

Namun, jika dilakukan setengah hati, Konvensi Capres Partai Demokrat justru akan membuat citra negatif partai meningkat. Sejauh mana kesempatan dengan calon alternatif itu akan baik, tetapi akan negatif kalau hanya pencitraan atau politik akal-akalan.

Menurut Ray Rangkuti, Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat bisa jadi “tak menarik lagi” karena sejak awal, apapun keputusannya, meski ada Komite Konvensi, pada akhirnya sudah “dikunci” Ketua Majelis Tinggi sejak awal. Ada beberapa faktor yang membuat konvensi Partai Demokrat menjadi tidak menarik dan bahkan dapat menjauhkannya dari harapan untuk membuat terobosan kepemimpinan nasional. *Pertama*, konvensi sudah terlebih dahulu “dikunci” dengan ketetapan harus berpatokan kepada

AD/ART Partai Demokrat. Itu artinya apa dan bagaimanapun pelaksanaan konvensi harus berpatokan pada pasal 13 ayat 5 AD/ART Partai Demokrat yang menyatakan bahwa kewenangan menetapkan calon presiden Partai Demokrat tetap berada di tangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dalam hal ini sekaligus sebagai dijabat ketua umum partai, yaitu SBY.

*Kedua*, akibat ketentuan ini tak diubah, mudah ditebak bahwa proses konvensi sekadar “pernak-pernik” untuk terlihat ada upaya demokratis dalam memilih capres. Padahal dengan tetap tidak menghapus ketentuan pasal 15 ayat 3 AD/ART dan faktanya ketua umum dan ketua majelis tinggi adalah orang yang sama, sudah lebih dari cukup memberi isyarat bahwa pencapaian substansi demokrasinya sangat lemah. Sekalipun dinyatakan secara lisan bahwa ketua majelis tinggi tidak akan memveto hasil konvensi, tapi hal itu tidak menjadi jaminan akan terlaksana.

*Ketiga*, sampai sejauh ini, Partai Demokrat belum berani mengungkapkan kisaran dana yang mereka butuhkan untuk pelaksanaan konvensi, dan dari mana dana didapatkan. Penting diungkapkan kepada masyarakat soal dana konvensi. Selain merupakan bagian dari kewajiban transparansi, juga karena partai Demokrat saat ini didera isu penggunaan dana ilegal dalam kongres partai mereka sebelumnya.

Menurut pengamat politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, belajar dari pengalaman Konvensi Partai Golkar, Konvensi Partai Demokrat harusnya bisa lebih baik dari konvensi yang digelar Partai Golkar menjelang pemilu 2004. Partai Demokrat harus bisa membuat konvensi dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dari Partai Golkar sehingga calon presiden yang terpilih dalam konvensi itu benar-benar merupakan calon presiden terbaik yang dapat memenangkan pemilu presiden 2014 mendatang.

Ide konvensi sendiri tentunya merupakan ide yang baik. Tapi konvensi itu secara umum juga ada aturannya. Konvensi harus digelar terbuka dan demokratis, artinya konvensi tidak ditentukan oleh satu atau sekelompok orang saja. Partai Demokrat harus belajar dari kekurangan-kekurangan konvensi yang

digelar oleh Partai Golkar, sehingga siapapun pemenang konvensi benar-benar pilihan yang paling baik sehingga dapat memenangkan pilpres 2014 mendatang.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat dalam menggelar konvensi. Konvensi partai selayaknya adalah cara untuk memilih capres secara demokratis dengan memberikan kebebasan kepada pengurus partai baik di pusat maupun daerah untuk memilih seorang calon presiden. Konvensi itu di manapun juga adalah untuk memilih kader-kader partai sendiri. Kalau mengusung calon lain diluar partai seperti rencana yang dilakukan oleh Partai Demokrat, justru itu menjadi aneh.

Tampaknya ini kesalahan konvensi Partai Golkar yang kembali diulang Partai Demokrat. Orang luar yang bukan orang partai kenapa harus dipilih? Dalam kehidupan kepartaian itu aneh. Orang luar yang tidak memimpin partai bisa menang, itu saja sudah tidak benar. Dalam Konvensi hendaknya memilih orang dari partai sendiri, karena kalau orang luar menang pun mesin partai tidak akan jalan.

## D. Analisis

Bagaimanapun, sulit dipungkiri bahwa Konvensi Capres Partai Demokrat bila tidak disikapi secara hati-hati justru akan berpotensi memperlemah soliditas Partai Demokrat sendiri. Peta dukungan terhadap kandidat yang berbeda-beda di dalam internal Partai Demokrat menjadi buktinya.

Dari sisi etika dalam berpolitik, bagaimanapun, Partai Demokrat belum optimal mengedepankan etika politik karena tidak meminta izin dulu kepada parpol terkait kader yang diundangnya. Namun demikian, bila kita menganalisa dari sudut etika politik, kita tidak bisa menerapkannya hanya pada Partai Demokrat sendiri. Etika politik juga dapat dilihat dari pihak yang diundangnya. Apakah pihak yang diundang ini melakukan penerimaan terhadap undangan Partai Demokrat dengan memperhatikan aturan-aturan di dalam Partai yang bersangkutan atau tidak.

Etika politik secara internal Partai, terutama juga dapat dilihat dari Kader Partai Demokrat sendiri –dalam arti bukan secara

kepartaian, melainkan secara individual— yang dinilai mulai terpecah ke dalam beberapa faksi pendukung calon tertentu. Tak etis apabila ada kader yang mendukung dan terlibat dalam penyuksesan salah satu calon. Sebab, saat ini bukan saatnya mendukung salah satu calon karena belum menjadi keputusan hasil konvensi. Memang sulit dipungkiri bahwa Konvensi Partai Demokrat justru melemahkan Partai Demokrat sendiri karena Kader-kader PD akan terpecah-belah. Sejumlah tokoh diperkirakan bakal mengikuti Konvensi Partai Demokrat.

Hal yang tidak kalah penting adalah persoalan etika politik pada pihak yang diundang di mana mereka masih menjabat posisi atau jabatan publik. Di sinilah etika politik mereka akan teruji, dalam konteks apakah mereka akan tetap mengedepankan tugas-tugas mereka dalam jabatan-jabatannya itu demi kepentingan bangsa dan negara (yang lebih luas), atau justru akan melalaikannya demi kesuksesannya dalam Konvensi Partai Demokrat. Hal ini perlu ditekankan mengingat banyak di antara pihak yang diundang dalam Konvensi masih memegang jabatan di eksekutif dan legislatif, maupun di institusi lainnya. Sebagaimana diketahui, saat ini setidaknya ada empat pejabat publik yang disebut akan ikut konvensi. Mereka adalah Gita Wirjawan (menteri Perdagangan), Dahlan Iskan (menteri BUMN), Marzuki Alie (ketua DPR), dan Irman Gusman (ketua DPD).

## E. Penutup

Rekomendasi pertama adalah terhadap Partai Demokrat. Konvensi Partai Demokrat hanya bisa dilanjutkan bila koridor-koridor pengaturannya telah disepakati secara mufakat di dalam internal Partai. Dengan kata lain, perlu adanya Nota Kesepahaman terlebih dahulu di dalam internal Partai Demokrat, menyikapi Konvensi itu. Inti yang harus dimuat didalam Nota Kesepahaman itu adalah persoalan komitmen para Kader Partai Demokrat untuk menjaga soliditas Partai, dan tidak terjebak pada “pertarungan” dukungan kepada para kandidat Konvensi.

Rekomendasi kedua adalah kepada pihak yang diundang dalam Konvensi Partai

Demokrat. Bagi tokoh-tokoh yang diundang dan masih menjabat dalam posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, etika jabatan harus tetap dikedepankan. Artinya, konvensi jangan sampai mengganggu kinerja institusi.

Tokoh-tokoh inipun harus menghargai peraturan-peraturan di dalam Partai dari mana mereka berasal, sebagai wujud implementasi etika politik yang lain. Jangan sampai terjadi pihak partai asal tidak mendapatkan permintaan izin atau pemberitahuan dari tokoh-tokohnya yang diundang, karena ini akan menjadi contoh pembelajaran politik yang tidak baik bagi masyarakat.

Terakhir, sebagai sebuah metode untuk menjaring calon presiden konvensi harus dapat menghasilkan calon terbaik sesuai kehendak rakyat. Berbagai pelajaran yang ada dalam pelaksanaan konvensi terkait dengan pendidikan politik dan etika politik hendaknya dapat dijadikan pertimbangan untuk masuk ke dalam revisi UU Pilpres ke depan.

## Rujukan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. “Maswadi Rauf: Konvensi Demokrat harusnya Bisa Lebih Baik,” <http://www.poskotanews.com/2013/08/12/>, diakses 24 Agustus 2013.
3. Firdaus, Febriana. “Plus Minus Konvensi Capres Partai Demokrat,” <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/09/078472090/>, diakses 24 Agustus 2013.
4. Yeni. “Inilah Kelemahan Konvensi Capres Partai Demokrat,” [http://www.starberita.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=95398%3A](http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95398%3A), diakses 24 Agustus 2013.
5. Kurniawan, Haris. “Kelebihan dan Kekurangan Konvensi,” <http://nasional.sindonews.com/read/2013/04/29/12/743027/>, diakses 24 Agustus 2013.
6. Rangkuti, Ray. “Lima Faktor Bikin Konvensi Capres Demokrat Tak Menarik,” <http://m.tribunnews.com/nasional/2013/08/13/>, diakses 24 Agustus 2013.